

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	SUARA KARYA	3	27-8-2002

Pansus: Pasca TAC Pertamina Jadi Efisien

JAKARTA (Suara Karya): Kasus kontrak kerjasama teknis (*Technical Assistance Contract/TAC*) antara Pertamina dan PT Ustraindo Petro Gas (UPG) diharapkan menjadi "pintu masuk" bagi pengungkapan tindak korupsi yang dilakukan pejabat Pertamina masa itu, khususnya pada bagian Eksplorasi dan Produksi (EP).

"Yang perlu diungkap adalah kenapa biaya operasi Pertamina sangat tidak efisien. Lantas, kenapa setelah ada kontrak TAC, di mana Pertamina mengalihkan semua karyawannya, biaya produksi malah lebih murah," ujar anggota Komisi VIII DPR yang juga anggota Pansus Pertamina-DPR, Priyo Budi Santoso di Jakarta, Senin (26/8).

Menurut dia, setelah mendengar berbagai keterangan berbagai sumber yang diundang resmi Pansus Pertamina, biaya produksi di empat lapangan minyak, masing-masing Bunyu, Jatibarang, Prabumulih, dan Pendopo mencapai 35 dolar AS per barel untuk Bunyu, 17 dolar AS per barel untuk Jatibarang dan Prabumulih, serta 25 dolar AS per barel untuk Pendopo.

"Sedangkan setelah kontrak TAC, di mana Pertamina mengalihkan semua karyawannya kepada investor di tiga lapangan minyak, minus Jatibarang, biaya produksinya hanya mencapai 4 dolar AS per barel," tuturnya.

Atas dasar itu, Priyo sangat berharap masalah inefisiensi dalam pengelolaan lapangan minyak itu juga menjadi perhatian pihak penyidik Kejaksaan. Seluruh pejabat terkait pun harus dipanggil dan bila ditemukan penyalahgunaan wewenang langsung diproses sesuai hukum sampai tuntas. "Sebaliknya, bila tidak terbukti, Keja-

gung sebaiknya membersihkan nama orang-orang tersebut," ucapnya.

Ia mengungkapkan, dari pantauan sementara hasil keterangan berbagai sumber, TAC antara Pertamina dan Ustraindo sangat menguntungkan pemerintah (Pertamina). "Tapi pihak penyidik bisa menggali lebih dalam," katanya.

Priyo mengakui, mantan Menteri Pertambangan Dan Energi (Mentamben), Ginandjar Kartasasmita pernah menjelaskan soal TAC kepada Pansus. "Penjelasannya sangat lengkap dan sampai saat ini Pansus memang belum memberikan kesimpulan," paparnya.

Ginandjar sendiri membantah pernyataan Ketua Pansus Pertamina DPR, Emir Moeis bahwa semua kasus KKN yang dibahas Pansus Pertamina DPR menempatkan dirinya sebagai tersangka. "Tidak benar bahwa saya dijadikan tersangka dalam semua kasus yang dibahas Pansus. Bahwa saya dijadikan tersangka dalam kasus TAC Pertamina-Ustraindo, itu benar karena saya dianggap terlibat dalam perubahan kontrak, padahal perubahan kontrak dilakukan setelah saya tidak menjabat Mentamben," ujarnya.

Menurut dia, penetapan dirinya sebagai tersangka karena alasan politis semata, mengingat TAC sangat menguntungkan Pertamina. Ia mengaku gembira dengan dilanjutkannya proses pemeriksaan kasus TAC oleh Kejaksaan.

"Saya akan membuktikan bahwa TAC antara Pertamina dan Ustraindo pra amandemen sangat menguntungkan pemerintah. Pertamina berhasil menghemat sekitar 65 juta dolar AS untuk total volume produksi TAC Ustraindo," katanya. (A-7)